

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk menyesuaikan target indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini dibuat dengan mempedomani RPD Kota Padang Panjang Tahun 2006-2026, LKJIP Tahun 2023, LKPJ Tahun 2023 serta masukan lain yang relevan dengan penyusunan rencana kerja ini. Perubahan Renja ini dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) perangkat daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Padang Panjang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

- h. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

- a. Sebagai penjabaran tindak lanjut dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD.
- b. Sebagai acuan dalam penetapan rencana kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

- a. Untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 berdasarkan isu dan masalah yang berkembang.
- b. Untuk menetapkan tahapan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 s.d Triwulan II

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.5. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/ Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Untuk melihat capaian kinerja suatu program dan kegiatan perlu dilakukan analisis. Hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana tingkat capaian atau keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan serta apa permasalahan atau kendala yang ada dalam pelaksanaan sehingga dengan adanya tinjauan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat dievaluasi secara detail yang nantinya akan berguna untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 melaksanakan 2 program dengan 14 kegiatan. Dari berbagai program dan kegiatan tersebut telah diupayakan secara maksimal untuk terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Meskipun demikian kita menyadari juga bahwa pada beberapa program dan kegiatan, hasilnya belumah seperti yang diharapkan. Namun tentunya hal ini tidak akan mengurangi tekad dan semangat kita untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan renja tahun 2024 tingkat capaian program sudah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan capaian sebesar 31,14%, sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai realisasi kegiatan 50% dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu:

- Kegiatan yang tidak mencapai realisasi kegiatan 50%, diantaranya:
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (10%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk seluruh ASN yang ada di Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

- Fasilitasi Kunjungan Tamu (30%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan pemakaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (10%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan menunggu dilantiknya pimpinan DPRD periode yang baru.
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (5%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan kegiatan ini masih dalam proses pengerjaan.
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (5%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan kegiatan ini masih dalam proses pengerjaan.
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (10%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan kegiatan ini masih dalam proses evaluasi / fasilitasi.
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (40%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan pemakaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pelaksanaan Reses (33%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan rencana awal pelaksanaan reses sebanyak 3 kali, kemudian dijadikan hanya untuk 2 kali kegiatan.
 - Kegiatan yang tidak terealisasi, diantaranya:
- Pengadaan Mebel (0%). Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (0%). Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan pengadaan peralatan dan mesin disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pelaksanaan Medical Check Up (0%). Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan padatnya jadwal kegiatan anggota DPRD dan adanya peralihan masa jabatan DPRD.
- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (0%). Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan jadwal pelantikan anggota DPRD periode yang baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2024.

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik (0%). Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan belum adanya usulan perda inisiatif dari DPRD.

Untuk lebih jelasnya, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)
4-02-01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100%	38,29%	38,29%
4-02-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	67,68%	67,68%
4-02-01-2.02-0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	294 org/bulan	199 org/bulan	67,68%
4-02-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	100%	0%	0%
4-02-01-2.05-0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	23 paket	0 paket	0%
4-02-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi	100%	50%	50%
4-02-01-2.06-0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	50%
4-02-01-2.06-0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	50%
4-02-01-2.06-0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	2 paket	50%

4-02-01-2.06-0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	120 laporan	50 laporan	41,6%
4-02-01-2.06-0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	11 laporan	45,8%
4-02-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100%	33,3%	33,3%
4-02-01-2.07-0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	1 unit	33,3%
4-02-01-2.07-0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-
4-02-01-2.07-0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	0 unit	0%
4-02-01-2.07-0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	0 unit	0%
4-02-01-2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan ecretariat DPRD yang terpenuhi	100%	50%	50%
4-02-01-2.08-0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6 laporan	50%
4-02-01-2.08-0002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komuniakasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	18 laporan	50%
4-02-01-2.08-0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6 laporan	50%
4-02-01-2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeritahan daerah	Persentase terpeliharanya BMD	100%	38,75%	38,75%
4-02-01-2.09-0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	4 unit	100%

4-02-01-2.09-0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	29 unit	100%
4-02-01-2.09-0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	725 unit	53 unit	7,3%
4-02-01-2.09-0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
4-02-01-2.14	Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase fasilitasi pelaksanaan protocol dan komunikasi pimpinan	100%	0%	0%
4-02-01-2.14-0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 laporan	0 laporan	0%
4-02-01-2.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase terfasilitasinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	33,33%	33,33%
4-02-01-2.15-0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	280 org/bulan	160 org/bulan	57,1%
4-02-01-2.15-0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	120 paket	0 paket	0%
4-02-01-2.15-0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	20 orang	0 orang	0%
4-02-01-2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi dan rumah tangga DPRD yang terpenuhi	100%	33,33%	33,33%
4-02-01-2.16-0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan	3 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-01-2.16-0003	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 laporan	6 laporan	50%
4-02-01-2.16-0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	12 paket	6 paket	50%

4-02-02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90%	34,75%	
4-02-02-2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90%	0%	0%
4-02-02-2.01-0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.01-0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	1 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.01-0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	1 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.01-0005	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.02	Pembahasan Kebijakan Kegiatan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90%	20%	20%
4-02-02-2.02-0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil KUA dan PPAS	2 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.02-0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	2 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.02-0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.02-0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.02-0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	2 dokumen	100%
4-02-02-2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90%	25%	25%
4-02-02-2.03-0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	4 laporan	-	0%

4-02-02-2.03-0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	4 laporan	-	0%
4-02-02-2.03-0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	4 laporan	-	0%
4-02-02-2.03-0008	Pembahasan LKPJ	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
4-02-02-2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	44%	44%
4-02-02-2.04-0001	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1 dokumen	0 dokumen	0%
4-02-02-2.04-0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	5 dokumen	83,3%
4-02-02-2.04-0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%
4-02-02-2.04-0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	6 orang	5 orang	83,3%
4-02-02-2.04-0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
4-02-02-2.05	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90%	44%	44%
4-02-02-2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	6 laporan	5 laporan	83,3%
4-02-02-2.05.0002	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	2 dokumen	-	0%
4-02-02-2.05-0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	60 dokumen	16 dokumen	26,6%

4-02-02-2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasnya tugas pimpinan dan anggota DPRD	90%	75,5%	75,5%
4-02-02-2.08-0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	23 dokumen	18 dokumen	78,26%
4-02-02-2.08-0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	15 dokumen	16 dokumen	106,6%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran Sekretariat DPRD pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD , dan meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dengan target skor 75%. Tabel 2.2 dapat dilihat dibawah ini:

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD			75	77	80				
2	Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif			75	77	80				
3	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah			100	100	100				
4	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi			90	90	90				

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Dalam menyusun perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD perlu perbandingan antara rancangan awal perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Ini dilakukan dengan mengkaji program kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2024 perlu dilakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan. Pada bagian ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2024
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	20.890.229.184	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	20.890.212.184	
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100%				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100%		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100,00%	3.314.985.784	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100,00%	3.314.985.784	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	350 Orang /bulan	3.314.985.784	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	350 Orang/bulan	3.314.985.784	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	100 %	11.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	100 %	11.500.000	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	11.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	11.500.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	590.787.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	590.787.600	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.521.900	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.521.900	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	170.700.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	170.700.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.999.700	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.999.700	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	146.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	146.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	187.566.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	187.566.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.807.470.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan	100 %	2.807.470.400	

						Daerah		perencanaan			
	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan)	3 Unit	2.802.930.000	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan)	3 Unit	2.802.930.000	
	Pengadaan Mebel	Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	Pengadaan Mebel	Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4.540.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4.540.400	
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi	100 %	2.021.887.750	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi	100 %	2.021.887.750	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.595.200	Penyediaan jasa surat menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.595.200	
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	192.947.750	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	192.947.750	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.344.800	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.344.800	
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeritahan daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	946.605.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeritahan		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	946.588.000	

						daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	398.375.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	398.375.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	210.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	210.800.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 unit	40.400.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 unit	40.383.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	297.030.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	297.030.000	
7	Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan		Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	702.087.200	Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan		Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	702.087.200	

	Fasilitasi Keprotokolan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	702.087.200	Fasilitasi Keprotokolan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	702.087.200	
8	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	8.856.778.050	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	8.856.778.050	
	Penyelenggaraa n administrasi Keuangan DPRD	Padang Panjang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang/B ulan	8.225.418.050	Penyelenggar aan administrasi Keuangan DPRD	Padang Panjang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang/Bul an	8.225.418.050	
	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 Paket	606.360.000	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 Paket	606.360.000	
	Pelaksanaan medical check up DPRD	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	25.000.000	Pelaksanaan medical check up DPRD	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	25.000.000	
9	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %	1.638.127.400	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %	1.638.127.400	
	Penyelenggaraa n administrasi Keanggotaan DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokume n	569.912.000	Penyelenggar aan administrasi Keanggotaan DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen	569.912.000	
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	218.097.600	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	218.097.600	

	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	850.117.800	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	850.117.800	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90 %	21.266.667.050	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90 %	21.265.667.050	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90 %	86.890.400	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90 %	86.890.400	
10	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7.078.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7.078.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	8.749.900	Pembahasan Rancangan Perda	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	8.749.900	
	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	59.964.000	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ke terangan dan/ atau naskah akademik	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	59.964.000	
	Penyusunan tata tertib DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.098.500	Penyusunan tata tertib DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.098.500	

11	Pembahasan Kebijakan Kegiatan Anggaran		Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	184.831.650	Pembahasan Kebijakan Kegiatan Anggaran		Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	184.831.650	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	40.385.800	Pembahasan KUA dan PPAS	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	40.385.800	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	30.785.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	30.785.500	
	Pembahasan APBD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	51.381.000	Pembahasan APBD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	51.381.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	35.836.150	Pembahasan APBD Perubahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	35.836.150	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	26.443.200	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	26.443.200	
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90 %	21.728.300	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90 %	21.728.300	
	Pembahasan LKPJ	Padang Panjang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	21.728.300	Pembahasan LKPJ	Padang Panjang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	21.728.300	
13	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	4.781.655.000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	4.781.655.000	

	Orientasi DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	556.597.000	Orientasi DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	556.597.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.221.139.000	Pendalaman Tugas DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.221.139.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Padang Panjang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	216.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Padang Panjang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	216.000.000	
	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	332.621.500	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	332.621.500	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	455.297.500	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	455.297.500	
14	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90 %	2.668.363.700	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90 %	2.667.363.700	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	1.706.195.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	1.706.195.000	
	Pelaksanaa Reses	Padang Panjang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	962.168.700	Pelaksanaa Reses	Padang Panjang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	40 Dokumen	961.168.700	
15	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	13.523.198.000	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	13.523.198.000	
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23 Dokumen	10.568.339.000	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23 Dokumen	10.568.339.000	

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 Dokumen	2.954.859.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 Dokumen	2.954.859.000	
--	-----------------------------------	-------------------	---	---------------	---------------	---	-------------------	--	---------------	---------------	--

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berkenaan dengan penelaahan usulan program dan kegiatan yang datang dari masyarakat, untuk tahun 2024 Sekretariat DPRD tidak ada usulan kegiatan yang datang dari masyarakat.

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan persidangan dan hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penganggaran, penyelenggaraan dan pengendalian administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2020 tema pembangunan nasional adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk pertumbuhan Berkualitas”. Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan di perkuat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan agenda itu disebut NAWACITA, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara;
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi;
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa;

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social.

Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun 8 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Delapan prioritas nasional tersebut adalah:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; III-2
3. Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit beesama bangsa-bangsa Asia lainnya;
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan;
6. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demogratis, dan terpercaya; dan
8. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan strategis yaitu meningkatkan pelayanan

terhadap kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

b. Sasaran

Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2024, dapat kita lihat sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 7. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitas keprotokolan
- 8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up
- 9. Kegiatan Layanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Penyediaan kebutuhan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian:

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.
 - Pembahasan rancangan peraturan daerah

- Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ keterangan dan/atau naskah akademik
 - Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan:
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD perubahan
 - Pembahasan pertanggungjawaban APBD
 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan:
 - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - Penyelenggaraan hubungan masyarakat.
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan:
 - Kunjungan kerja dalam daerah
 - Pelaksanaan Reses
 6. Fasilitasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Fasilitasi tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tabel 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Target		Anggaran (Rp)			Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Sebel um	Sesud ah	RKPD 2024	APBD 2024	Peruba han Renja 2024			Nasi onal	Daer ah		Targ et	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SEKRETARIAT DPRD				30.648.9 47.125,0 0	42.383.0 53.447,0 0	42.155.8 79.234,0 0							37.571.903.15 0,00
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				30.648.9 47.125,0 0	42.383.0 53.447,0 0	42.155.8 79.234,0 0							37.571.903.15 0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD				30.648.9 47.125,0 0	42.383.0 53.447,0 0	42.155.8 79.234,0 0							37.571.903.15 0,00
4.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100%	100%	18.945.4 54.875,0 0	20.931.0 86.397,0 0	20.890.2 12.184,0 0							17.146.634.40 0,00
4.02. 01.20 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	2.759.60 0.000,00	2.994.98 8.997,00	3.314.98 5.784,00					Tata kelola keuangan di set DPRD		2.441.302.178 ,00

4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.759.600,00	2.994.988.997,00	3.314.985.784,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.441.302.178,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	100%	100%	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00					ASN di lingkungan Sekretariat DPRD		0,00
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	23 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	454.807.500,00	647.537.600,00	590.787.600,00					ASN dilingkungan Sekretariat DPRD		701.312.500,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	41.820.000,00	43.521.900,00	43.521.900,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.900.000,00

4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	140 Paket	140 Paket	80.512.500,00	170.700.000,00	170.700.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					80.512.500,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	20.000.000,00	42.999.700,00	42.999.700,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	120 Laporan	92.475.000,00	146.000.000,00	53.525.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000.000,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	220.000.000,00	244.316.000,00	187.566.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					440.000.000,00
4.02.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100%	100%	2.160.000.000,00	2.919.650.400,00	2.807.470.400,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD di set DPR		120.000.000,00

4.02.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	3 Unit	3 Unit	2.000.000.000,00	2.802.930.000,00	802.930.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di sediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	4 Unit	0 Unit	110.000.000,00	112.180.000,00	0,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	4.540.400,00	4.540.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00
4.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penjang urusan sekretariat DPRD yang terpenuhi	100%	100%	2.017.198.025,00	2.021.887.750,00	2.021.887.750,00					Jasa penunjang set DPRD		1.633.910.000,00
4.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	28.695.200,00	28.695.200,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.750.000,00

4.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	210.000.000,00	192.947.750,00	192.947.750,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					210.000.000,00
4.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	108 Laporan	1.801.198.025,00	1.800.344.800,00	1.800.344.800,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.414.160.000,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	100%	100%	871.267.000,00	1.028.355.000,00	956.588.000,00					BMD di set DPRD		2.095.000.000,00
4.02.01.2.9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	400.000.000,00	398.375.000,00	398.375.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.000.000,00
4.02.01.2.9.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan	5 Unit	5 Unit	114.488.000,00	210.800.000,00	210.800.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120.000.000,00

		perizinannya												
4.02.01.2.9.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	8 Unit	8 Unit	58.650.000,00	97.150.000,00	40.383.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75.000.000,00
4.02.01.2.9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	298.129.000,00	322.030.000,00	297.030.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000.000,00
4.02.01.2.14	Pelaksanaan protocol dan komunikasi pimpinan	Presentase fasilitas pelaksanaan protocol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	210.340.000,00	702.087.200,00	702.087.200,00					Fasilitas pimpinan DPRD		300.000.000,00
4.02.01.2.14.0001	Fasilitas keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitas keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	210.340.000,00	702.087.200,00	702.087.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000.000,00
4.02.01.2.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Presentasi terfasilitasinya DPRD	100%	100%	8.857.345.050,00	8.856.778.050,00	8.856.778.050,00					Layanan keuangan di set DPRD		8.748.413.897,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	8.225.418.050,00	8.225.418.050,00	8.225.418.050,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.483.846.897,00

4.02.01.2.15.0002	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD	120 Paket	120 Paket	606.380.000,00	606.380.000,00	506.360.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					239.000.000,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikut medical Check up DPRD	20 Orang	20 Orang	25.587.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.567.000,00
4.02.01.2.16	Layanan administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100%	100%	1.603.397.300,00	1.748.301.400,00	1.638.127.400,00					Pelayanan administrasi di lingkungan set DPRD		106.692.285,00
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	521.472.300,00	680.086.000,00	569.912.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120.000.000,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	218.097.600,00	218.097.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250.000.000,00
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang di sediakan	300 Paket	300 Paket	931.925.000,00	850.117.800,00	850.117.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					736.695.825,00

4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasi nya Tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90%	90%	11.703.492.250,00	21.451.967.050,00	21.451.967.050,00							20.425.268.750,00
4.02.02.01	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase fasilitas peraturan daerah dan peraturan DPRD	90%	90%	86.930.000,00	86.890.400,00	86.890.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peraturan daerah dan DPRD		95.375.000,00
4.02.02.01.0001	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.080.000,00	7.078.000,00	7.078.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.910.000,00
4.02.02.01.0002	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000,00	8.749.900,00	8.749.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.965.000,00

4.02. 02.01 .0004	Fasilitas penyusunan penjelasan keterangan naskah akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan keterangan naskah akademik yang di fasilitasi	1 Doku men	1 Doku men	60.000.0 00,00	59.964.0 00,00	59.964.0 00,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					70.000.000,00
4.02. 02.01 .0005	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1 Doku men	1 Doku men	11.100.0 00,00	11.098.5 00,00	11.098.5 00,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3.500.000,00
4.02. 02.2. 02	Pembahasan kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90%	90%	169.685. 350,00	184.831. 650,00	184.831. 650,00					Pembahas an Anggaran dan belanja		169.685.350,0 0
4.02. 02.2. 02.00 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 Doku men	2 Doku men	35.408.6 00,00	40.385.8 00,00	40.385.8 00,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					35.408.600,00
4.02. 02.2. 02.00 02	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	2 Doku men	2 Doku men	25.814.7 50,00	30.785.5 00,00	30.785.5 00,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					25.814.750,00
4.02. 02.2. 02.00 03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 Doku men	2 Doku men	51.241.5 00,00	51.381.0 0,00	51.381.0 0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					51.241.500,00

4.02. 02.2. 02.00 04	Pembahasan APBD perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	35.813.500,00	35.836.150,00	35.836.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.813.500,00
4.02. 02.2. 02.00 06	Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan pertanggung jawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.407.000,00	26.443.200,00	26.443.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.407.000,00
4.02. 02.2. 03	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase terfasilitasi nya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90%	90%	31.716.450,00	21.728.300,00	21.728.300,00					Perangkat daerah dilingkung an padang panjang		31.716.450,00
4.02. 02.2. 03.00 2	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00
4.02. 02.2. 03.00 3	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00

4.02. 02.2. 03.00 4	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	4 Lapora n	4 Lapora n	5.000.00 0,00	0,00	0,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00
4.02. 02.2. 03.00 8	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah	2 Doku men	2 Doku men	16.716.4 50,00	21.728.3 00,00	21.728.3 00,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.716.450,00
4.02. 02.2. 04	Peningkatan kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90%	90%	2.708.93 5.000,00	4.781.65 5.000,00	4.781.65 5.000,00					Anggota DPRD	3.922 .266. 500,0 0	
4.02. 02.2. 04.00 01	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokun en	1 Doku men	500.000. 000,00	556.597. 000,00	556.597. 000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00
4.02. 02.2. 04.00 02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Hasil dokumen pendalaman tugas DPRD	6 Doku men	6 Doku men	1.500.00 0.000,00	3.221.13 9.000,00	3.221.13 9.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000.000 ,00

4.02. 02.2. 04.00 05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	6 Orang	6 Orang	216.000.000,00	216.000.000.000,00	216.000.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					216.000.000.000,00
4.02. 02.2. 04.00 06	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	332.621.500,00	332.621.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					357.000.000,00
4.02. 02.2. 04.00 08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	292.935.000,00	455.297.500,00	455.297.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					349.266.500,00
4.02. 02.2. 05	Penyerapan dan pengumpulan Aspirasi masyarakat	Presentase Aspirasi masyarakat yang terhimpun	90%	90%	2.206.225.450,00	2.853.663.700,00	2.853.663.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Usulan aspirasi		3.206.225.450,00
4.02. 02.2. 05.00 01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	6 Laporan	6 Laporan	1.452.803.000,00	1.706.195.000,00	1.706.195.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.452.803.000,00
4.02. 02.2. 05.00 02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00

4.02. 02.2. 05.00 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan reses	60 Doku men	40 Doku men	748.442. 450,00	1.147.46 8.700,00	961.188. 700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					748.422.450,0 0
4.02. 02.2. 08	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase terfasilitasiny a tugas pimpinan dan anggota DPRD	90%	90%	6.500.00 0.000,00	13.523.1 98.000,0 0	13.523.1 98.000,0 0					Anggota DPRD		13.000.000.00 0,00
4.02. 02.2. 08.00 01	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasidan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	23 Doku men	23 Doku men	5.000.00 0.000,00	10.568.3 39.000,0 0	10.568.3 39.000,0 0	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10.000.000.00 0,00
4.02. 02.2. 06.00 04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas pimpinan DPRD	15 Doku men	15 Doku men	1.500.00 0.000,00	2.29485 9.000,00	2.29485 9.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3.000.000.000 ,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2024. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2024. Terlaksananya Perubahan Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Sekretariat DPRD.

Padang Panjang, Agustus 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOTA PADANG PANJANG



WITA DESI SUSANTI, ST

NIP. 19741223 200212 2 002